

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang menjembatani kesenjangan antara rumusan kebijakan dan dampak nyata dimasyarakat. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan konkret yang dilaksanakan oleh beragam aktor, dari dalam maupun dari luar struktur pemerintahan, untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Lebih dari sekedar proses mekanis, implementasi kebijakan sarat akan dinamika interaksi antar aktor yang terlibat, ketersediaan sumber daya, karakteristik kebijakan itu sendiri serta dukungan dan hambatan dari lingkungan eksternal (Farid Asyhadi, F. A. (2024)).

Kebijakan merupakan sekumpulan kegiatan, tindakan, sikap, rencana program dan keputusan yang diambil oleh para aktor (pihak-pihak yang terlibat) sebagai usaha untuk mengatasi masalah yang ada. Kebijakan memiliki peranan krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu (a) kebijakan adalah semacam respons terhadap peristiwa yang terjadi untuk menciptakan keharmonisan antara pihak-pihak yang berkepentingan, serta mendorong perilaku pihak yang menerima perlakuan tidak rasional terhadap kerja sama, (b) kebijakan juga merupakan suatu praktik sosial. Kebijakan bukanlah sesuatu yang tunggal atau terpisah. Ini berarti bahwa kebijakan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai hasil dari perumusan yang didasari oleh kejadian-kejadian di dalam masyarakat. Kegiatan

tersebut berasal dari proses kehidupan sosial yang tidak bersifat asing, terpisah, dan berdiri sendiri bagi komunitas (Desrinelti et al., 2021).

Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia merupakan kebijakan yang mengatur tentang aktivitas Penyebaran HIV/AIDS. Penyebaran HIV/AIDS masih menjadi isu kesehatan global yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan nasional dalam penanggulangan HIV/AIDS, yang dituangkan dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) HIV/AIDS serta didukung oleh Peraturan Presiden dan berbagai regulasi turunan lainnya (Mardalena & Apriani, 2020). Kebijakan ini menekankan pendekatan multisektoral, peningkatan akses layanan kesehatan, serta pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Di tingkat daerah, Provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan Syariat Islam, turut menyusun kebijakan yang bersinergi dengan kebijakan nasional namun disesuaikan dengan nilai-nilai lokal (Istiqomah, 2020:23). Pemerintah Aceh telah mengeluarkan berbagai regulasi dan program, seperti Peraturan Gubernur tentang penanggulangan HIV/AIDS, pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi, serta integrasi program pencegahan ke dalam layanan kesehatan primer dan pendidikan berbasis agama. Namun, pelaksanaan kebijakan di tingkat provinsi memerlukan penguatan implementasi di tingkat kabupaten/kota. Kota Lhokseumawe sebagai salah satu kota penting di Aceh memiliki karakteristik sosial ekonomi yang kompleks.

Sebagai pusat industri dan dagangan, mobilitas penduduk yang tinggi di Lhokseumawe turut meningkatkan potensi risiko penyebaran HIV/AIDS.

Analisis terhadap kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan perencanaan, bagaimana peran lintas sektor, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan lokal dalam menanggulangi HIV/AIDS secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara kumulatif tercatat awal ditemukan pada tahun 2006 sebanyak 88 pengidap HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe terus meningkat hingga pada Tahun 2022 ditemukan empat penderita baru, 2023 ditemukan 10 kasus baru dan 2024 ditemukan 14 kasus baru hingga bulan Juli sampai saat ini jumlah penderita HIV/AIDS di kota Lhokseumawe sebanyak 106 orang. Penderita dengan penjelasan di atas dapat di lihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus HIV/AIDS Di Kota Lhokseumawe

Tahun	HIV	AIDS
2021	56	32
2022	60	32
2023	67	29
2024	76	30
2025	82	39
Jumlah	341	162

(Sumber: Dinkes Kota Lhokseumawe dalam KOMPAS.com 2024)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Lhokseumawe, dalam menyikapi banyaknya temuan kasus HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe yang terus meningkat, Pemerintah Kota Lhokseumawe

menerbitkan kebijakan yang membahas tentang strategi dan pola penanganan permasalahan HIV/AIDS yaitu berpedoman pada Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang tentang kesehatan upaya penanggulangan pencegahan penyakit menular. Dalam Peraturan Qanun tersebut juga terdapat serangkaian kegiatan yang menjadi *guideline* penanggulangan HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe yaitu kegiatan promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan, serta rehabilitasi sosial.

Dalam penanggulangan melalui kegiatan promosi yaitu kegiatan ini dilakukan melalui promosi kesehatan kesekolah-sekolah ataupun mengadakan seminar dengan tema pencegahan virus HIV/AIDS fokus pada penyebaran informasi, peningkatan kesadaran, serta pemberian edukasi mengenai HIV/AIDS dan cara penularannya adapun beberapa cara yang bisa dilakukan dalam promosi kesehatan untuk pencegahan HIV/AIDS yaitu memberikan edukasi tentang HIV dan cara penularannya dengan memberikan informasi lengkap tentang apa itu virus HIV/AIDS. Selanjutnya kegiatan Pencegahan HIV untuk melakukan suatu pencegahan penularan HIV dapat melibatkan berbagai tindakan yang efektif dan telah terbukti mengurangi resiko penyebaran virus HIV di antaranya dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual, kondom yang digunakan harus dengan benar pada hendak melakukan berhubungan cara ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam pencegahan penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Lebih lanjut dilakukan kegiatan Pemeriksaan diagnosis HIV untuk melakukan oemerikasaan tersebut perlu melalui beberapa jenis tes yang

mendeteksi keberadaan virus atau respon imun tubuh terhadap infeksi HIV adapun beberapa metode utama yang di gunakan dalam diagnosis ini.

Pemerintahan Kota Lhokseumawe berkolaborasi antara Rumah Sakit Kesrem, Puskesmas Muara Satu dan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dalam penanggulangan penyebaran HIV/AIDS dikota Lhokseumawe. Dinas Kesehatan disini posisinya sebagai perangkat kerja utama dalam implementasi kolaborasi dalam penyelesaian kasus HIV AIDS di kota Lhokseumawe berdasarkan tupoksi Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe. Pemerintahan Kota Lhokseumawe memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya adalah mendorong terbentuknya LSM/kelompok peduli HIV/AIDS. Dengan begitu, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu melakukan kerjasama dengan *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat seperti yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Untuk itu, pemerintah selaku pemeran yang berkewajiban dalam penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa bekerja mandiri, akan tetapi memerlukan pihak lain untuk berkolaborasi. Oleh sebab itu, diperlukan pemakaian ide tata kelola kolaborasi atau *Collaborative Governance*.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan adanya berbagai permasalahan yang terdapat dalam proses penanggulangan HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe dalam upaya promosi dan pencegahan penularan HIV/AIDS, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan **IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV/ AIDS DI KOTA LHOKSEUMAWE.**

1.2 Tujuan Masalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait dengan penyakit HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan upaya pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menangani HIV/ AIDS.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini di tetapkan focus penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Angka Penurunan Terkait Dengan Penyakit HIV/ AIDS Di Kota Lhokseumawe.

1. Implementasi dalam penanganan angka penurunan terkait dengan penyakit HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe
2. Hambatan dan upaya pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menangani penurunan HIV/ AIDS.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimakah Implementasi dalam penanganan angka penurunan terkait dengan penyakit HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe?
2. Apa hambatan antar aktor dalam penanganan penurunan HIV/ AIDS?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan bahan studi perbandingan selanjutnya serta akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah untuk melengkapi kajian-kajian yang dapat mengarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani angka penurunan terkait dengan penyakit HIV/ AIDS di Kota Lhokseumawe.

2. Secara praktis

- a) Memberikan masukan dan alternatif tambahan kepada pihak Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, terutama dinas kesehatan Kota Lhokseumawe dalam membuat regulasi maupun tindakan dalam upaya pencegahan penyebaran infeksi virus HIV/AIDS.
- b) Menjadi informasi tambahan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, maupun Puskesma dalam menemukan fakta-fakta baru agar mengambil tindakan inovasi dalam penanganan masalah penyebaran virus HIV/AIDS yang terus meningkat di Kota Lhokseumawe.
- c) Diharapkan menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga dengan membaca hasil penelitian ini mampu menambah wawasan dan pemahaman pembaca tentang virus HIV/AIDS.